

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Dinas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas ARPUS mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Posisi Dinas ARPUS sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dengan mengoptimalkan teknologi informasi". Dari isu tata kelola pemerintahan, Dinas ARPUS terkait dengan sub isu: Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan public yang responsif berbasis teknologi informasi. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata kelola pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan teknologi informasi	1. Masih sedikit OPD di Kabupaten Pati menerapkan arsip pola baru	1. Pemeliharaan dan penduplikasian Dokumen/arsip daerah masih sedikit. 2. Ketepatan temu kembali dokumen/arsip belum optimal. 3. jaringan kearsipan OPD di Kabupaten Pati belum terbangun dan
a	Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan publik yang responsif berbasis teknologi informasi	1.1. Belum optimalnya digitalisasi dokumen/arsip daerah	

		1.2. Masih rendahnya pengguna dokumen/arsip daerah	terintegrasi
		<p>2.Masih rendahnya pertumbuhan pengguna layanan perpustakaan</p> <p>2.1 Masih rendahnya pertumbuhan peminjam bahan pustaka dan buku yang dipinjam</p> <p>2.2 Masih minimnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP)</p>	<p>1 Jumlah pengunjung perpustakaan masih rendah</p> <p>2 Masih sedikitnya peminjam buku dan buku yang dipinjam</p> <p>3 Belum optimalnya pembinaan perpustakaan</p>

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas ARPUS Kabupaten Pati mendukung pencapaian misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan“ dan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik", terutama pada sub isu Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan publik yang responsif berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas ARPUS sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1 dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola	Belum optimalnya sistem	Kompetensi kearsipan kurang	SDM masih memiliki ASN dengan jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan

	pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas	Manajemen Sistem kearsipan OPD di Kabupaten Pati belum terintegrasi	Tersedia ragam Diklat kearsipan, perpustakaan perencanaan, analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau swasta
		Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kompetensi sumber daya kearsipan yang kurang optimal (kuantitas maupun kualitas) Jejaring administrasi kearsipan instansi pemerintah maupun swasta, belum dikembangkan secara optimal	Adanya peraturan perundang-undangan tentang kearsipan dan perpustakaan
		Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip	Dukungan anggaran dari Pemkab. Pati untuk melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta masih belum optimal	
		Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan	Sarana prasarana pengelolaan arsip yang masih kurang	
	Misi 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Adanya era digitalisasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi darimanapun dan kapanpun	
		Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai	Sarana prasarana perpustakaan di Kabupaten Pati yang masih sangat kurang (koleksi bahan bacaan maupun fasilitas gedung perpustakaan yang sesuai standar	
		Belum optimalnya penyelamatan	Sarana prasarana dan SDM belum memadai	

		koleksi perpustakaan		
--	--	-------------------------	--	--

Tantangan yang menjadi isu strategis bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan yang memadai;
2. Kurang tersedianya tenaga pengelola kearsipan dan perpustakaan yang memadai;
3. Kurang tersedianya beragam jenis bahan koleksi pustaka yang mudah dan murah untuk diakses masyarakat;
4. Belum terwujudnya pelayanan kearsipan dan perpustakaan yang inovatif dan kreatif.

3.3. Telaahan Rancangan Akhir Renstra K/L dan Renstra Badan ARPUS Provinsi

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati tidak terlepas dan terkait langsung dengan Renstra dari ANRI, Perpustakaan maupun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga terdapat kesinambungan dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan prioritas dari ANRI dalam Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan kearsipan daerah I dan II (unit baru), dengan output/keluaran tercapainya jumlah pemerintah provinsi/kab/kota yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Pembinaan kearsipan pusat, dengan output/keluaran tercapainya jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD – TIK;
3. Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dengan output/keluaran terkelolanya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (prioritas nasional diusulkan);

Dalam Renstra Perpustakaan Tahun 2015-2019 ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan gemar membaca, dengan strategi :
 - a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
 - b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan.

- c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
2. Pengembangan koleksi Indonesiana yang lengkap dan mutakhir, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan.
 - b. Meningkatkan pengelolaan koleksi naskah kuno.
 - c. Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan atau tentang Indonesia (Indonesiana).
 - d. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas, dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya lokal.
3. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK, dengan strategi :
 - a. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan secara demokratis dan berkeadilan.
 - b. Meningkatkan pola interaksi perpustakaan, lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, satuan pendidikan, masyarakat ilmiah dalam pengembangan repository dan diversifikasi layanan.
 - c. Meningkatkan akses bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
 - d. Membangun partisipasi aktif lembaga penelitian dan pengkajian, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan melalui pemberdayaan perpustakaan.
4. Pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa, dengan strategi :
 - a. Memperkuat preservasi dan konservasi bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
 - b. Memperkuat preservasi warisan dokumenter dan budaya dalam format digital.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sumber belajar, dengan strategi :
 - a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan.
 - b. Meningkatkan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan baik nasional maupun internasional.
 - c. Membangun resource sharing antar perpustakaan di Indonesia.

6. Peningkatan kompetensi SDM, dengan strategi :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi perpustakaan.
 - b. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pelatihan kepustakawanan.

Renstra Dinas ARPUS Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian Renstra Dinas ARPUS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas ARPUS Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu meningkatnya digitalisasi dan akses masyarakat terhadap dokumen/arsip daerah dan meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Pati.

Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM arsiparis dan pustakawan dan peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan daerah dan pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan Dinas ARPUS Provinsi Jawa Tengah akan berdampak pada penyusunan kebijakan kearsipan dan perpustakaan di daerah. Capaian kinerja Renstra Dinas ARPUS Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas ARPUS Kabupaten Pati akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Dinas ARPUS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati menyesuaikan Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah yang ada. Dalam hal ini keberadaan lembaga perpustakaan pengembangannya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memadukan pola aktivitas masyarakat.

Implikasi telaah RT/RW Kabupaten Pati terhadap tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yaitu memperluas jaringan layanan perpustakaan terutama didaerah terpencil/lokasi desa terpencil, di ruang terbuka publik, dan pengembangan e-perpustakaan/perpustakaan digital, untuk mendukung pengembangan pertumbuhan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.3.
Ringkasan Isu-isu dari Tugas Fungsi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Kabupaten Pati Tahun 2017

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan PD	Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM kearsipan dan perpustakaan belum optimal. 2. Pelayanan kearsipan dan perpustakaan belum optimal. 3. Manajemen kearsipan (pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip) belum optimal.
Sasaran jangka menengah ANRI	Sasaran jangka menengah ANRI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Arpus : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Kearsipan b. Pengelolaan Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan arsip melalui digitalisasi arsip belum optimal. 2. Pembinaan terhadap OPD untuk pengelolaan arsip pola baru masih rendah. 3. Jumlah dan kompetensi arsiparis belum optimal.
Sasaran jangka menengah Perpusnas RI	Sasaran jangka menengah PERPUSNAS RI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Arpus : <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan budaya gemar membaca b. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya minat pada buku dan budaya membaca di masyarakat. 2. Jenis dan jangkauan layanan perpustakaan masih terbatas. 3. Terbatasnya akses perpustakaan hingga ke desa. 4. Jumlah dan kompetensi pustakawan belum memadai.
Sasaran jangka menengah Propinsi Jawa Tengah	Sasaran jangka menengah Dinas Arpus Prov. Jateng yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Arpus Kab. Pati : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas Sistem Administrasi Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemanfaatan arsip dan perpustakaan oleh masyarakat. 2. Rendahnya minat baca masyarakat. 3. Rendahnya pembinaan perpustakaan desa. 4. Sarana dan prasarana kurang memadai untuk mendukung peningkatan jumlah perpustakaan. 5. Belum optimalnya pemeliharaan arsip melalui

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
	<p>b. Meningkatnya Pengelolaan dokumen / arsip daerah</p> <p>c. Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip dan perpustakaan</p> <p>d. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan dan perpustakaan</p> <p>e. Meningkatnya budaya baca masyarakat</p> <p>f. Meningkatnya jumlah perpustakaan yang berkembang dan dikelola dengan baik.</p> <p>g. Terselamatkannya khasanah arsip bernilai sejarah, serta lestariannya koleksi perpustakaan.</p>	<p>digitalisasi.</p> <p>6. Masih belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan arsip terutama berbasis IT.</p> <p>7. Belum optimalnya pengelolaan arsip pola baru oleh OPD.</p>

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Sasaran jangka menengah pada RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022		
Implikasi RT/RW	<p>Perluasan jaringan layanan perpustakaan terutama didaerah terpencil/lokasi desa terpencil, di ruang terbuka publik, dan pengembangan e-perpustakaan /perpustakaan digital, untuk mendukung pengembangan pertumbuhan wilayah</p>	<p>1. Terbatasnya akses masyarakat ke perpustakaan, terutama di kawasan pedesaan.</p> <p>2. Peningkatan jangkauan layanan melalui pemanfaatan teknologi informatika dan perpusling.</p>

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusivitas daerah menuju *democratic governance*. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Pati pada tahun 2017-2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dituntut lebih humanis, antisipatif, responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional yang berdampak pada kondusivitas daerah. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan Dinas; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pati. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum yaitu : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- b. Lokasi perpustakaan dan depo arsip daerah yang strategis dan dekat dengan fasilitas publik sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
- c. Dukungan pendanaan dan pemkab.

- d. Aturan tentang pemanfaatan dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan perpustakaan.
2. Kelemahan Internal
 - a. Terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian : (i) arsiparis, (ii) tenaga IT kearsipan, (iii) pustakawan, (iv) tenaga IT perpustakaan.
 - b. Ketersediaan ASN arsiparis dan pustakawan.
 - c. Kapasitas dan kualitas perpustakaan dan depo arsip yang kurang memadai.
 - d. Belum efektifnya sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi
 - e. Jumlah perpustakaan masih rendah dikarenakan akses dan pemanfaatan perpustakaan yang masih rendah dan perpustakaan yang masih dianggap sepele oleh masyarakat.
 3. Tantangan/Ancaman Eksternal
 - a. Adanya tuntutan dari ANRI supaya daerah membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menuntut daerah untuk memberikan pelayanan dan informasi berbasis teknologi dan informasi;
 - c. Adanya tuntutan dari Perpustakaan RI tentang penerapan program Indonesia Gemar Membaca Tahun 2019.
 4. Peluang Eksternal
 - a. Adanya i-jateng dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD);
 - b. Adanya penawaran pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan.

Dari kajian tersebut diatas, isu-isu strategis yang akan menjadi tantangan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan bidang kearsipan dan perpustakaan, diantaranya adalah :
 - a. Fungsional arsiparis;
 - b. Fungsional pustakawan;
 - c. Tenaga keahlian bidang IT untuk kearsipan dan perpustakaan.
2. Pemberdayaan perpustakaan.
3. Pendampingan terhadap OPD untuk menerapkan pengelolaan arsip pola baru.
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kearsipan dan perpustakaan.
 - a. Akses internet untuk mendukung perkembangan teknologi digital.
 - b. Sarana dan prasarana perpustakaan digital.
5. Digitalisasi arsip.